



<http://ppm.ejournal.id>

JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

ISSN 2540-8739 (print) || ISSN 2540-8747 (online)

LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN



Deradikalisasi dan Pembangunan Budaya Inklusif di Jawa Barat, Indonesia

Windy Dermawan¹, RMT Nurhasan Affandi², Gilang Nur Alam²

^{1,2}Universitas Padjadjaran

Article History

Received 11.09.2019
Received in revised form
29.11.2019
Accepted 02.12.2019
Available online 16.12.2019

ABSTRACT

RADICALIZATION AND THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE CULTURE IN WEST JAVA, INDONESIA. The aim of the Community Engagement (PPM) research is to explain efforts to deal with radicalization so that the country is not centric in the form of inclusive cultural development. The description seeks to trace the interpretation of Jatinangor District, Sumedang Regency, West Java Province. This was motivated by the tendency to strengthen radical understanding which was observed in West Java after the Reformation era in Indonesia. Strengthening radicalization can trigger the development of a culture of intolerance, verbal and physical violence, and exclusivism that is not impossible to bring the potential for national disintegration or threat to security in Indonesia. The study attachments in this PPM are Problem-Based Learning and Community-Based Research (CBR). Especially, in constructing ideas that are relevant to efforts so that problems in the community can be faced optimally. The formation of an inclusive culture is thought to enable the openness (inclusiveness) of society, tolerance, pluralism, collaboration and cooperation to control the diversity of identities in society. PPM is a follow-up from previous research which found that efforts to deal with radicalization were still state-centric. Based on the results of the PPM, it was concluded the need for awareness-raising and societal empowerment activities on an ongoing basis to deal with radicalization.

KEYWORDS: Development, Inclusive, Radicalization, Security, Societal.

DOI: 10.30653/002.201944.228



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
© 2019 Windy Dermawan, RMT Nurhasan Affandi, Gilang Nur Alam.

PENDAHULUAN

Radikalisme menjadi kata yang diperdebatkan dan belum ada kesepakatan makna hingga saat ini. Radikalisme menjadi fenomena yang mencuat pasca peristiwa 9/11 dan terjadinya Bom Bali I tahun 2002 disusul dengan Bom Bali 2 pada 2005. Selanjutnya, perhatian dunia kembali ke Indonesia dengan terjadinya peristiwa Bom Sarinah tahun 2016, peledakan bom di masjid pada Polres Cirebon, serta gereja di Surakarta, berikut serangkaian aksi radikalisisasi lainnya. Hal tersebut mengejutkan publik global yang

¹ Corresponding author: Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Padjadjaran; Jl. Raya Jatinangor KM 21, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; Email: windy.dermawan@unpad.ac.id

mengenal Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim berikut sifat moderatnya dalam kehidupan beragama. Kemudian diketahui bahwa, peristiwa itu dilakukan oleh Jemaah Islamiyah di Indonesia yang menjadi bagian dari jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara.

Radikalisme termasuk kedalam paham atau aliran (ideologi) yang menuntut perubahan atau pembaruan sosial politik dengan cara kekerasan (Christmann, 2012). Sedangkan radikalisasi merupakan proses perubahan sikap individu atau kelompok dengan kecenderungan menentang dialog dan kompromi bersama pihak yang berbeda (Schmid, 2013). Penganut radikalisme adalah orang-orang yang ingin menjalani dan menyampaikan ide-ide politiknya, mempertegas doktrin-doktrin, dengan cara 'keras'. Radikalisasi terjadi ketika pemikiran serta perilaku seseorang menjadi sangat berbeda dari bagaimana umumnya anggota masyarakat/komunitas melihat masalah sosial dan berpartisipasi secara politik. Hanya sejumlah kecil orang saja melakukan radikalisasi. Mereka berasal dari beragam kelompok, baik politik, kebangsaan, kebudayaan, etnis, maupun keagamaan (McFarlane et al, 2015).

Van Bruinessen (2002) mengemukakan bahwa, gerakan radikal di Indonesia dapat ditelusuri pada kemunculan Darul Islam di beberapa wilayah Indonesia, berikut adanya Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menjalin hubungan transnasional bersama gerakan-gerakan Islamis di Timur Tengah. Tapi bukan berarti gerakan radikal di Indonesia adalah kepanjangan (sambungan) dari gerakan di Timur Tengah dalam merespons tindak penindasan. Gerakan radikal di Indonesia muncul atas dasar kesamaan visi-misi perubahan sosial di lingkup Syariat Islam, memberat pada suatu transmisi gagasan. Sementara itu, Darul Islam melengkapi organisasinya dengan kekuatan militer yang digunakan untuk perjuangan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Azra (2006) mengungkap bahwa di Indonesia terdapat dua kelompok yang mewarnai 'keislaman' di Indonesia pasca era reformasi, yaitu Muslim arus utama dan kelompok radikal. Penyebab radikalisasi tidaklah bersifat monolitik, namun banyak sekali faktornya. Antara lain yaitu, ketidakmampuan negara untuk memberi hak-hak warganya sehingga menimbulkan disparitas politik, ekonomi serta sosial. Ataupun sifat negara yang represif, militeristik, mengabaikan keprihatinan lokal, berikut faktor etnisitas (Jones, 2018; Rabasa, 2003). Untuk menghadapi radikalisasi, selain upaya pemerintah juga disarankan agar menempuh pemberdayaan atas kelompok-kelompok moderat (Azra, 2006) di Indonesia.

Jawa Barat adalah salah satu daerah di Indonesia yang disukai (kaum radikal) untuk melakukan radikalisasi. Daerah ini dihuni oleh 48 juta penduduk (sekira 18% dari total penduduk Indonesia), menjadi wilayah kedua terpadat penduduknya setelah Jakarta dengan 97% penganut Islam. Secara historis tercatat bahwa, Jawa Barat ialah tempat terjadinya pemberontakan Islamis. Darul Islam (DI) merupakan gerakan yang ingin mendirikan Negara Islam dideklarasikan oleh Kartosuwiryo pada Agustus 1949 di Jawa Barat. Pada 1957, Tentara Islam Indonesia mengontrol sepertiga dari wilayah Provinsi ini (Lanti, Ebih, & Dermawan, 2019). Fenomena kekinianya pun mencatat bahwa, beberapa daerah di Jawa Barat menjadi sasaran jaringan-jaringan radikalisme. Sebagian dari kelompok teroris, termasuk Jemaah Islamiyah (JI), sempat memperkuat jaringannya pada beberapa area di Jawa Barat (Prabowo, 2019).

Tak perlu disanggah lagi bahwa, ada kebutuhan menghadapi radikalisme yang serius. Terutama untuk mendinikan antisipasi atas setiap potensi perpecahan sosial. Kemudian memelihara lingkungan yang aman, nyaman, serta harmoni di masyarakat. Salah satu ikhtiar penting yaitu, memberi atau menambah pengetahuan (pemahaman) masyarakat mengenai radikalisme; mengolah wawasan 'praktis' pencegah/penangkal radikalisme serta radikalisme. Kemungkinan untuk itu termuat dalam budaya inklusif. Secara sosial, bobot inklusifitas turut menentukan daya cegah atau daya tangkal atas radikalisme dan radikalisme. Menumbuh-kembangkan budaya inklusif adalah anjakan menuju terwujudnya lingkungan sosial dengan keterbukaan yang lentur, tangguh, dalam mengendalikan keberagaman masyarakat. Baik dalam arti perbedaan karakteristik, identitas, kapabilitas, status, kondisi, maupun tradisi dalam kehidupan bermasyarakat. Arti inklusif berlawanan dengan arti eksklusif. Makna ringkasnya yakni, handal untuk menerima (menjalani) perbedaan-perbedaan di masyarakatnya. Mampu bersikap serta bertindak taktis menghadapi keberagaman supaya tidak merusak kebersamaan. Dari kecakapan sosial inilah dapat diharapkan kesiapan menghalau radikalisme ataupun radikalisme yang memeralat perbedaan atau keberagaman. Dalam konteks itu pula dikemukakan (Angus 2016) bahwa, pada sebagian besar pemerintah di seluruh dunia terselenggara program-program kontra-radikalisme secara efektif dengan melibatkan berbagai komunitas minoritas.

Berbekal pengetahuan itu, maka dilaksanakanlah PPM berjudul, "*Pencegahan Radikalisme dengan pembangunan budaya Inklusif di Jawa Barat, Indonesia*". Hal yang memotivasi pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu kehendak berperanserta dalam proses memberi pengetahuan atau pemahaman mengenai budaya (perilaku) inklusif. Dengan budaya atau perilaku sosial yang inklusif itu diharapkan mampu mencegah radikalisme. Khususnya radikalisme bermuatan ekstrimisme, fanatisme, intoleransi ke arah terorisme, menggunakan aksi-aksi kekerasan. Radikalisme tersebut mengancam keamanan sosial, dalam arti menghalangi hingga merusak kehidupan bermasyarakat yang guyub, rukun, tentram. Selanjutnya kegiatan PPM ini juga dimaksudkan sebagai kepedulian sosial serta kontribusi Universitas Padjadjaran bagi kehidupan masyarakat serta untuk kedamaian Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

PPM ini dilakukan dengan memilih lokasi di Jatiroke, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Jatinangor masa kini merupakan kawasan pendidikan dengan lima perguruan tinggi yaitu, Unpad, ITB, Ikopin, IPDN, serta Unwim. Di kawasan inipun sempat diberitakan perihal penangkapan atas terduga teroris, pada perumahan di Desa Cinanjung (Kartini, 2017).

PPM ini ditempuh menurut metode pendidikan masyarakat berdasarkan hampiran *Problem-Based Learning* (PBL) serta *Community-Based Research* (CBR). Khususnya, untuk mengonstruksi gagasan yang relevan bagi usaha-usaha agar persoalan di masyarakat dapat dihadapi secara optimal. Menurut hampiran tersebut masyarakat dilibatkan atas dasar komitmennya memberi dukungan sumberdaya, serta kontribusinya dalam pemecahan masalah, sebagai upaya memperoleh luaran yang bermanfaat (Banks & Manners, 2012). Sesuai hampiran itulah digunakan teknik diskusi kelompok (ter)kecil dan dialog (wawancara) terfokus, studi kepustakaan dan informasi daring, tinjauan lapangan

dan triangulasi data, serta forum sosialisasi. Metode dan teknik ini dipergunakan untuk mengoptimasi penalaran terhadap budaya inklusif itu sendiri serta kemungkinan derivasinya yang relevan bagi kondisi pada lokasi riset dan PPM.

Penyelenggaraan PPM ini juga menjadi sarana bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mempelajari sekaligus pembelajaran perihal yang jadi hirauan bersama. Turut meningkatkan pemahaman dan peranserta aktif para pihak didalam kegiatan bersama. Wawancara dilakukan kepada narasumber dan informan diantaranya yaitu, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, Badan Nasional penanggulangan Terorisme Provinsi Jawa Barat, aparat keamanan, masyarakat (orang tua, Camat Jatinangor, sertan tokoh agama). Dari mereka dicatat beberapa fakta, realitas, informasi, opini, himbauan atau pesan-pesan yang terkait dengan isu radikalisasi serta radikalisme, berikut antisipasi dan pencegahannya.

Forum sosialisasi yang sengaja diderivasi dengan arahan model atau teoresasi merupakan sarana implementatif sekaligus sumber pakan-balik. Ditempuh agar dapat memetik peluang evaluasi untuk aplikasi obyek riset atau sasaran sosialisasi yang lebih luas. Target sosialisasi kali ini ialah siswa dan guru SMPN 2 Jatinangor (lokasi di Jatiroke) mencakup sekira 40 Orang. Sebagai instrumen riset, digunakan kuesioner yang menyerupai skala Likert agar dapat meninjau pandangan (persepsi), pernyataan (sikap dan tindakan) para peserta sosialisasi. Indikan melalui empat skala, disebutkan dengan: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), serta Sangat Tidak Setuju (STS). Analisis dilakukan atas seluruh informasi riset PPM mengenai pembangunan budaya inklusif dalam rangka mencegah radikalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PPM ini terlaksana di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Jatinangor terdiri dari 12 desa dengan total jumlah penduduk mencapai 113.913 jiwa. Penduduk Jatinangor rata-rata bekerja sebagai buruh/karyawan dan pekerja swasta (Badan Pusat Statistik, 2018). Kegiatan PPM ini dibagi menjadi tiga bentuk, diantaranya yaitu diskusi, riset lapangan dan wawancara, serta kegiatan sosialisasi. Berikut ini diuraikan ketiga bentuk kegiatan tersebut.

Diskusi Terfokus

Pada kegiatan ini, dilakukan analisis dan pemetaan masalah yang terdapat di lokasi hirauan. Kegiatan ini melibatkan dosen, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, aparat keamanan, serta sejumlah mahasiswa dengan latar belakang program studi yang berbeda-beda. Dari hasil curah ide dan pemikiran dapat diketahui bahwa, kawasan Jatinangor merupakan suatu kawasan pendidikan dengan perubahan sosial dan lingkungan yang cukup berkembang. Modernisasi menjadi salah satu aspek pertumbuhan di kawasan ini. Terdapatnya ribuan mahasiswa di kawasan ini memberi pengaruh terhadap pola berpikir, bentuk perekonomian, interaksi sosial, adat istiadat, yang merupakan hasil interaksi antara kaum pendatang dengan penduduk setempat. Aspek hirauan yang terdampak perubahan ini yaitu pola berpikir.

Perguruan tinggi menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya kaum intelektual yang diharapkan mampu memberi kontribusi bagi perkembangan bangsa dan negara. Eksistensi mahasiswa, selain berpotensi besar bagi pembangunan dan kegiatan positif

lainnya, juga menjadi sasaran bagi keterlibatannya dalam aktivitas sosial politik, salah satunya yaitu rekrutmen radikalisme, kekerasan dan bahkan terorisme. Hal ini yang diresahkan oleh para pemangku kepentingan, khususnya sejumlah tokoh di Kecamatan Jatinangor. Sifat yang kritis, *open minded*, serta potensi-potensi lain pada mahasiswa, dianggap berdampak positif atau negatif terhadap generasi muda ataupun masyarakat tempat mahasiswa berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu, dicemaskan oleh tokoh masyarakat di Kecamatan Jatinangor, kemungkinan dari pengaruh negatif paham radikal yang disebar melalui (memanfaatkan) mahasiswa.

Rekomendasi dari hasil diskusi ini yaitu perlunya menguatkan kesadaran dari masyarakat mengenai paham radikal yang mengarah pada kekerasan, intoleransi, atau bahkan diacu ke terorisme. Penguatan kesadaran ini dilakukan terhadap masyarakat mulai dari perorangan, keluarga, sampai kelompok masyarakat yang luas. Melibatkan berbagai unsur, diantaranya tokoh di Kecamatan, aparat keamanan, aparat pemerintah daerah, dari RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan sampai ke pemerintahan Kabupaten. Melibatkan juga organisasi kepemudaan seperti, Karang Taruna dan organisasi sosial kemasyarakatan yang hirau terhadap persoalan ini. Begitupun kelompok-kelompok keagamaan, untuk berkontribusi dalam menghadapi radikalisme berupa pertimbangan dan atau pemikiran yang dapat menangkal paham radikal tersebut. Kegiatan PPM ini diharapkan oleh para tokoh di Kecamatan Jatinangor menjadi suatu kegiatan rutin yang melibatkan secara aktif partisipasi berbagai kalangan.

Survei Lapangan dan Wawancara

Setelah melakukan diskusi dengan berbagai unsur masyarakat sebagaimana dituturkan sebelumnya, lalu ditempuh tinjauan lapangan yang merujuk kemungkinan kondisional keamanan sosial dan kerawanan sosial seperti terlihat di lokasi hirauan. Kegiatannya ialah mengunjungi unsur masyarakat dan mencatat interaksi sosial yang dibicarakan antara lain untuk mengidentifikasi bagaimana perkembangan organisasi kepemudaan dan keagamaan yang tumbuh di lokasi hirauan. Dari hasil riset lapangan, tertinjau bahwa, kondisi organisasi kepemudaan di Kecamatan Jatinangor beragam, ada yang aktif dan memiliki struktur dan program kerja yang jelas dan nyata, namun terdapat pula yang lemah dari aspek kaderisasi serta pembinaannya. Organisasi kepemudaan ialah indikasi dari dan peluang bagi peran aktif pemuda dalam merespon dinamika lingkungannya, sebagai pilar untuk mencegah radikalisme.

Selain itu ditinjau pula kondisi organisasi keagamaan. Kegiatan organisasi keagamaannya melibatkan mahasiswa pendatang di sekitar lokasi. Beberapa kegiatan rutin dari organisasi keagamaan diantaranya ceramah dan pengajian mingguan dan bulanan, kegiatan perayaan hari besar Islam dan penggalangan dana untuk bantuan sosial kemanusiaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menumbuhkan nilai-nilai positif. Hal ini tertinjau pula dalam arti organisasi keagamaan yang ada mampu menjadi benteng terhadap perkembangan radikalisme. Beberapa organisasi tersebut seringkali mendapat undangan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pencegahan radikalisme yang diadakan oleh instansi pemerintah, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sejauh tinjauan yang dilakukan, tampaknya kegiatan keagamaannya belum ada yang eksklusif. Batasan yang dimaksud yaitu eksklusifitas yang teracu pada suatu kelompok keagamaan terbatas, tanpa pemahaman komprehensif hingga penafsirannya cenderung membatasi diri, cenderung

mengajarkan kebencian atas individu/kelompok yang berbeda pandangan dengan kelompoknya. Pertimbangannya ialah bahwa, sikap eksklusif seperti itu menjadi potensi dari gerakan yang akan mengancam persatuan, toleransi, pluralitas, serta nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan lainnya yaitu, wawancara dengan para narasumber ataupun informan untuk memetik informasi lebih lanjut terkait perihal radikalisis termasuk pencegahan atau tindakan antisipatifnya. Wawancara ini dilakukan pada tiga kategori kelompok, yaitu instansi pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Dari wawancara ini tersedia pula bekal bagi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Simpulan wawancara tersebut dituturkan dalam alinea-alinea berikutnya.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat disimpulkan bahwa, belajar untuk terbiasa hidup dengan perbedaan sebenarnya harus dimulai sejak anak masih dini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendidik dan menjaga akhlak tetap baik, seperti menghormati dan menghargai teman, sopan santun, dan yang utama adalah kejujuran. Akhlak ini dapat dibangun dengan keterbukaan dalam keluarga dan juga pengawasan terhadap anak dari orang tuanya. Keterbukaan dalam keluarga harus dibangun oleh orang tua agar terciptanya suasana nyaman untuk anak bercerita kepada orang tua, sehingga jika anak melihat suatu masalah atau memiliki masalah itu sendiri ada tempat untuk bertukar pikiran dengan orang dewasa. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan tafsir informasi yang salah dari anak. Sebagai bentuk pengawasan orang tua dalam mendidik anak terkadang dibutuhkan juga hukuman jika anak melakukan kesalahan agar mereka tahu bahwa yang dilakukan itu tidak baik, ini juga harus dilakukan pada lingkup cara anak bergaul dengan teman-teman dan lingkungannya.

Hasil wawancara dengan lembaga pendidikan yaitu bahwa upaya untuk mencegah radikalisis adalah ketika gejala-gejala yang terlihat harus segera dilaporkan atau dicegah. Adanya hotline atau nomor yang bisa dihubungi untuk melaporkan hal tersebut dan seminar yang sedang dirancang merupakan upaya preventif atau antisipatif, dengan mengajarkan pencegahan secara dini itu sangat baik. Tentunya yang paling besar ada dari pendidikan, seyogianya dimunculkan kurikulum untuk kasus ini. Upaya lain yang bisa dilakukan sebagai kalangan akademisi yaitu menulis ide dan gagasan melalui blog atau website, kemudian di jurnal ilmiah juga. Lalu, menyekolahkan anak ke institusi pendidikan islam yang mainstream. Penting juga untuk melakukan sharing ide dengan mahasiswa, agar dapat memandang dunia dengan nyata dan mencegah radikalisis.

Hasil wawancara dengan aparat keamanan dan pemerintahan yaitu bahwa paham radikal tidak cocok berkembang di Indonesia karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebagai contoh dampak radikalisis di Indonesia adalah kekacauan yang sempat terjadi gegara perbedaan pilihan pemimpin, adanya pemikiran memilih salah satu pemimpin adalah sebuah tuntutan agama, sampai ada yang menyebutkan kalimat takbir ketika kekacauan itu terjadi. Menurut informan bahwa terorisme yang berkedok jihad itu sangat tidak baik, jihad untuk agama kita di masa sekarang bukan untuk kekerasan, ataupun bukan untuk memilih seseorang pemimpin. Terorisme itu hanya kena doktrin, yang bisa disebabkan oleh suatu lingkungan yang buruk. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah radikalisis yaitu perlu pintar dalam memilih pergaulan dan perbanyak pengetahuan mengenai radikalisis. Bisa jadi kita mendapatkan strategi mencegah radikalisis dari situ. Bisa juga belajar dari media youtube, sekarang banyak video yang memberikan pengetahuan mengenai radikalisis. Contoh kecil upaya

pengecahan radikalisis adalah mendiskusikan segala sesuatu dengan keluarga, artinya perlu open minded, dan juga terbuka dengan teman-teman mengenai radikalisis. Sesuatu berita yang diterima perlu diklarifikasi sehingga kita dapat terhindar dari subjektivitas dan berita *hoax* atau *fake news*.

Kegiatan Sosialisasi

Terminologi radikal dapat diartikan sebagai kembali kepada 'akar' atau dasar dari suatu keyakinan. Radikal sendiri sebenarnya tidak selalu bersifat negatif jika dilakukan tanpa adanya kekerasan, atau kepentingan lain di luar keyakinannya, misalnya kepentingan politik. Namun begitu, pada saat ini dilakukan radikalisis oleh oknum-oknum kepada masyarakat umum sebagai bentuk perolehan kepentingan politik untuk meraih kekuasaan. Fenomena ini yang perlu dicegah. Radikalisis biasanya dilakukan dengan peniadaan kebenaran kepada pihak lain yang berbeda. Berbeda dalam hal ini bisa dalam bentuk keyakinan agama sampai kepada sesama agama yang hanya saja berbeda pemahamannya. Di Jatinangor, dikenal dengan wilayah pendidikan yang ditempati oleh 5 perguruan tinggi yaitu, ITB, Unpad, IKOPIN, IPDN, dan UNWIM.

Dengan kondisi Jatinangor yang didiami oleh pendatang (mahasiswa), hal ini menjadikan Jatinangor tidak dapat terlepas dari kerawanan sosial yang timbul dari adanya perbedaan, mulai dari perbedaan pemikiran antara mahasiswa dan masyarakat, agama, budaya, adat istiadat dan perbedaan lainnya. Efeknya pada Jatinangor adalah 1) fasilitasi administrasi mahasiswa, 2) peningkatan ekonomi berbanding lurus dengan sanitasi, 3) kerawanan sosial. Kecamatan memiliki tim lapangan untuk melakukan deteksi dini kerawanan sosial, salah satunya radikalisme. Sementara ini hanya ada informasi secara personal bahwa sudah ada pengaruh-pengaruh seperti [radikalisme] di Jatinangor, tetapi belum diketahui dari mana asal pengaruh tersebut. Tetapi belum ada parameter yang jelas untuk radikalisis, apakah radikalisis agama atau terorisme. Gerakan sosial yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Jatinangor adalah pertemuan pembinaan desa antara camat dengan tokoh-tokoh masyarakat (perangkat desa, BPD, tokoh pemuda, pemuka agama, ketua RW dan RT) sebulan sekali.

Untuk mencegah radikalisis, perlu adanya sinergi diantara semua pihak, baik aparat pemerintah, civitas akademika, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Terutama untuk mengkaji radikalisme itu sendiri, sosialisasi pemahaman teknologi kebaruan, *anti-hoax*, sinergi infrastruktur dan aparat negara untuk memenuhi pelayanan dasar berikut pemberdayaan masyarakat agar unsur-unsur masyarakat yang rentan terhadap pengaruh radikalisis menjadi (lebih) berdaya. Karena kerentanan terhadap pengaruh radikalisis biasanya diiming-imingi dengan keuntungan ekonomi atau sosial. Karena itu, dilakukan kegiatan sosialisasi bagi guru dan siswa sekolah menengah mengenai budaya inklusif pencegah dini radikalisme dan kerawanan sosial.

Pertimbangan memilih lokasi SMPN 2 Jatinangor untuk forum sosialisasi ini yaitu, lokasinya dekat dengan Universitas Padjadjaran. Sehingga kegiatan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien dari aspek kedekatan lokasi dengan kampus. Termasuk memudahkan dalam mobilisasi ataupun akomodasi kegiatan. Pertimbangan berikutnya adalah karena kesediaan pihak sekolah untuk menerima penyelenggaraan riset PPM termasuk forum sosialisasi. Sehingga memudahkan kegiatan karena adanya dukungan dan kerjasama dari pihak internal sekolah. Alasan terakhir memilih lokasi tersebut ialah kesesuaian jumlah dan kriteria target untuk sosialisasi yang menetapkan minimal 40

orang peserta pada kriteria masyarakat atau warga di wilayah Jatinangor dengan rentang usia 12-45 tahun. Adapun jumlah siswa SMPN 2 Jatinangor mencapai 600 orang berumur sekira 12-14 tahun.

Forum Sosialisasi berjudul: *Pencegahan Radikalisasi Melalui Pengembangan Budaya Inklusif*. Waktu pelaksanaan kegiatan yaitu, hari Rabu, 24 Juli 2018 pukul 09.00 s.d. 12.00. Kegiatan ini ditujukan untuk melihat hirauan masyarakat terhadap fenomena radikalisasi di Jatinangor dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Jatinangor mengenai radikalisasi yang dapat mengancam keamanan sosial. Manfaat yang diharapkan yaitu kegiatan ini akan mampu menumbuhkan kepekaan sosial dan memberdayakan masyarakat Jatinangor untuk mencegah radikalisasi melalui praktek budaya inklusif pada lingkungannya. Forum sosialisasi dimulai dengan pengondisian peserta sebagai tahap persiapan. Setelah persiapan memadai, para peserta menyimak materi yang disampaikan, dilengkapi dengan penjelasan singkat mengenai acara yang mereka ikuti. Tahap berikutnya memberi gambaran audio-visual dengan penayangan film atau video yang sudah disiapkan.

Setelah penayangan film/video itu, kemudian diajukan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap tayangan itu. Selanjutnya peserta diajak membangkitkan semangat sebelum memasuki acara berikutnya yakni diskusi kelompok. Selesai acara diskusi kelompok, pemateri mulai menyampaikan isu radikalisme dan radikalisasi, serta pembangunan budaya inklusif. Penyampaian materi itu diberi contoh-contoh fenomenologis ataupun kasuistik di tingkat lokal, nasional, global. Kemudian diadakan permainan kelompok untuk meninjau serapan interpretif para peserta terhadap materi dari forum sosialisasi. Kepada peserta yang aktif berpartisipasi diberi hadiah (*doorprize*) peralatan belajar. Setelah tuntas, lalu dilakukan foto bersama untuk melengkapi dokumentasi kegiatan. Sambil beristirahat, sebelum penutupan acara, dilakukan pula "obrolan" bersama guru pembina siswa, terutama mengenai forum sosialisasi itu serta isu radikalisme ataupun radikalisasi pada kalangan (maha)siswa dan pemuda.



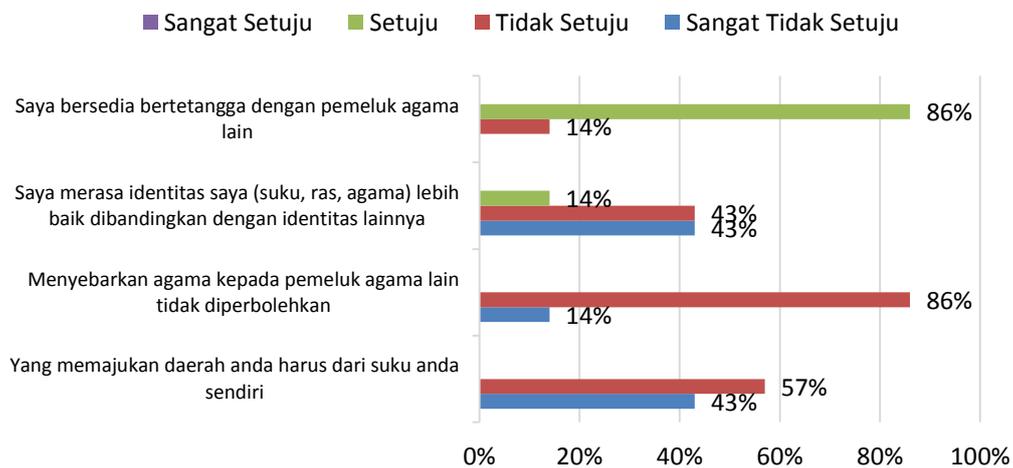
Gambar 1. Lokasi Kegiatan Sosialisasi



Gambar 2. Foto Bersama Peserta Sosialisasi dan Tim Pengabdian Pada Masyarakat

Forum sosialisasi tuntas, beralih ke penyebaran, pengisian, serta pengumpulan kuesioner mengenai upaya pencegahan radikalisasi. Kuesioner ini dimaksudkan untuk meninjau pandangan (persepsi) serta pernyataan (sikap dan tindakan) para peserta, baik mengenai radikalisasi dan radikalisme maupun pengembangan budaya inklusif. Responden berjumlah 40 siswa, dari berbagai kelas. Dirujuk dengan menggunakan metode *stratified random sampling*. Didasarkan atas rekapitulasi kuesioner, kemudian data disusun sebagai berikut.

Persepsi Responden



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Gambar 3. Grafik Persepsi Responden terhadap Isu Radikalisasi dan Budaya Inklusif

Gambar 3 menunjukkan grafik persepsi responden terhadap isu radikalisasi yang dapat diidentifikasi melalui persepsi responden dalam lingkungannya berada yang menuntutnya untuk berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya yang beragam

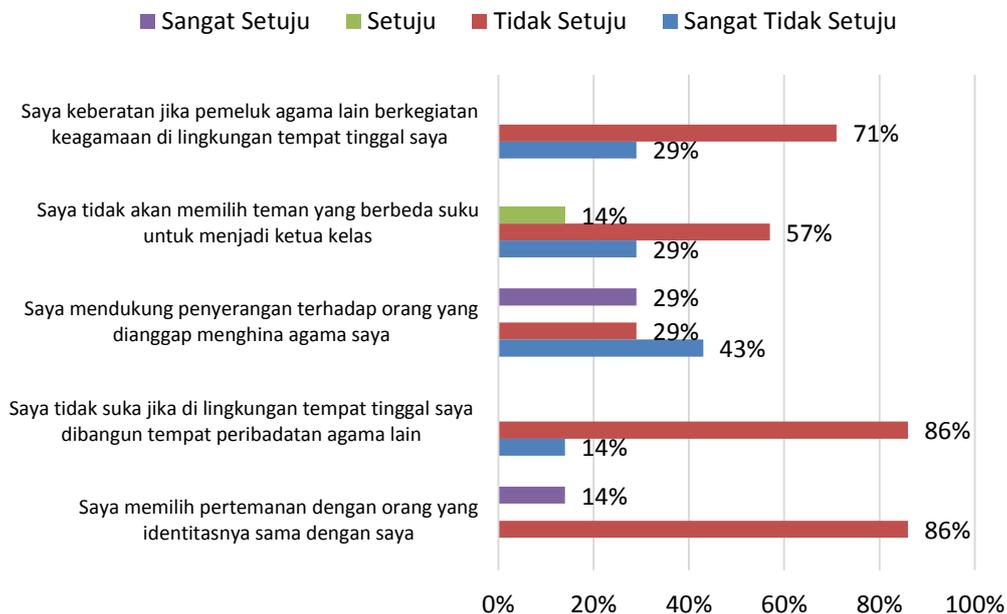
identitas. Berdasarkan grafik mengenai persepsi responden terkait isu radikalisme dan budaya inklusif, 86% responden bersedia untuk bertetangga dengan pemeluk agama lain, dan 14% responden tidak setuju bertetangga dengan pemeluk agama lain. Responden juga memiliki persepsi bahwa 43% menilai tidak setuju dan sangat tidak setuju jika identitasnya, baik suku, ras, agama, lebih baik dibandingkan dengan identitas lainnya. Sementara itu, 14% responden menilai bahwa identitasnya lebih baik dibandingkan dengan identitas lainnya. Selanjutnya, 86% responden tidak setuju jika menyebarkan agama kepada pemeluk agama lain tidak diperbolehkan, dan 14% responden setuju bahwa menyebarkan agama kepada pemeluk agama lain tidak diperbolehkan. Terakhir, 57% responden menilai tidak setuju jika yang memajukan daerahnya harus yang berasal dari sukunya sendiri, dan 43% responden sangat tidak setuju jika yang memajukan daerahnya harus dari sukunya sendiri.

Berdasarkan grafik di atas, kami melihat bahwa responden memiliki persepsi mampu membangun budaya inklusif di lingkungan masyarakatnya, hal ini terlihat dari 86% responden bersedia bertetangga dengan pemeluk agama lain, 43% responden tidak setuju dan sangat tidak setuju bila identitasnya (suku, agama, ras) lebih baik dibandingkan dengan identitas lainnya yang berbeda dengannya, dan 57% tidak setuju, bahkan 43% lainnya sangat tidak setuju jika yang memajukan daerahnya harus dari sukunya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mampu mengembangkan prinsip atau nilai-nilai pluralitas, inklusivisme dan kerjasama di masyarakat yang tidak menutup kemungkinan adanya keberagaman pada aspek suku, agama dan ras di lingkungan mereka berada.

Namun demikian, terdapat kecenderungan yang mengarah pada radikalisme kognitif di masyarakat, hal ini terlihat dari 14% responden tidak setuju untuk bertetangga dengan pemeluk agama lain, 14% responden menilai setuju bahwa identitasnya lebih baik dibandingkan dengan identitas lainnya, dan 86% responden tidak setuju bahkan 14% lainnya sangat tidak setuju jika menyebarkan agama kepada pemeluk agama lain tidak diperbolehkan. Persepsi ini tidak menutup kemungkinan munculnya prinsip atau nilai-nilai intoleransi terhadap perbedaan di masyarakat, eksklusivisme dalam pergaulan, persepsi superioritas identitasnya dibandingkan identitas lainnya, dan prinsip saling menghormati antarpemeluk agama yang berbeda keyakinan. Dengan demikian, kami melihat bahwa diperlukan antisipasi atau pencegahan dengan berbagai bentuk kegiatan yang dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan radikalisme pada tataran kognitif atau persepsi agar dapat mengkanter ide-ide atau pemikiran yang dapat mengarah pada radikalisme sikap dan tindakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kerentanan terhadap radikalisme kognitif dimungkinkan membawa kerawanan pada keamanan bagi masyarakat, karena dapat mengarah pada sikap dan tindakan kekerasan baik verbal maupun nonverbal, bahkan pada tataran yang lebih tinggi berpotensi mengarah pada terorisme.

Gambar 4 menunjukkan sikap responden terhadap isu radikalisme yang dapat diidentifikasi melalui sikap responden dalam lingkungannya berada yang menuntutnya untuk berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya yang beragam identitas.

Sikap Responden



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Gambar 4. *Grafik Sikap Responden terhadap Isu Radikalisasi dan Budaya Inklusif*

Berdasarkan grafik pada Gambar 4 mengenai sikap responden terkait isu radikalisasi dan budaya inklusif, sebanyak 71% responden tidak setuju dan 29% responden sangat tidak setuju bahwa mereka keberatan jika pemeluk agama lain melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya, 57% responden bersikap tidak setuju dan 29% bersikap sangat tidak setuju bahwa mereka tidak akan memilih teman yang berbeda suku untuk menjadi ketua kelas. Sementara itu, 14% responden setuju bahwa mereka tidak akan memilih teman yang berbeda suku untuk menjadi ketua kelas. Berikutnya, 29% responden tidak setuju dan 43% sangat tidak setuju bahwa mereka memberikan dukungan penyerangan terhadap orang yang dianggap menghina agamanya, dan 29% responden sangat setuju untuk mendukung penyerangan. Berikutnya, 86% responden tidak setuju dan 14% sangat tidak setuju bahwa mereka tidak suka jika di lingkungan tempat tinggalnya dibangun tempat peribadatan agama lain. Terakhir, sebanyak 86% responden tidak setuju bahwa mereka memilih pertemanan dengan orang yang beridentitas sama dengan mereka, dan 14% responden sangat setuju bahwa mereka memilih pertemanan dengan orang yang beridentitas sama dengan mereka.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa responden memiliki sikap untuk membangun budaya inklusif di lingkungan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari 71% responden tidak setuju dan 29% sangat tidak setuju jika mereka keberatan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan pemeluk lain di lingkungan tempat tinggalnya. 57% responden tidak setuju dan 29% sangat tidak setuju bahwa mereka tidak akan memilih teman yang berbeda suku untuk menjadi ketua kelas. Kemudian, 29% responden tidak setuju dan 43% responden sangat tidak setuju untuk mendukung penyerangan terhadap orang yang dianggap

menghina agamanya. Pada bentuk sikap lainnya, 86% responden tidak setuju dan 14% sangat tidak setuju bahwa mereka tidak suka jika di lingkungan tempat tinggalnya dibangun peribadatan agama lain. Terakhir, budaya inklusif ditunjukkan dengan 86% responden tidak setuju mereka memilih pertemanan dengan orang yang identitasnya sama dengan mereka. Dari hasil rekapitulasi tersebut, budaya inklusif ditunjukkan oleh sikap responden yang tidak keberatan di lingkungannya diadakan pelaksanaan kegiatan pemeluk agama lain, bahkan dibangun tempat ibadah pemeluk agama lain di lingkungan tempat tinggal mereka, pemilihan ketua kelas tidak ditentukan berdasarkan suku yang sama dengan mereka dan mereka tidak memilih pertemanan berdasarkan atas kesamaan identitasnya dengan mereka, serta tidak mendukung terhadap tindakan kekerasan dengan menyerang pihak yang dianggap telah menghina agamanya. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mampu mengembangkan sikap toleransi, menghormati perbedaan identitas di masyarakat, nonkekerasan dalam menghadapi masalah, inklusif dalam pergaulan dan mengembangkan kerjasama di masyarakat beragam dalam aspek suku, agama dan ras di lingkungan mereka berada.

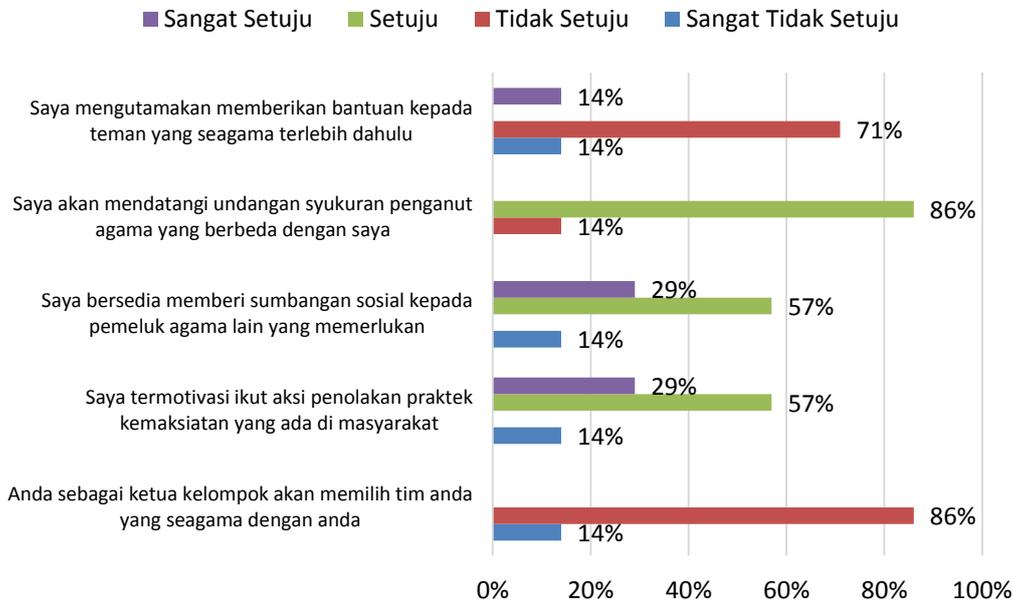
Namun demikian, terdapat kecenderungan yang mengarah pada radikalisasi sikap di masyarakat, hal ini terlihat dari 14% responden setuju bahwa mereka tidak akan memilih teman yang berbeda suku untuk menjadi ketua kelas, 29% responden sangat setuju untuk mendukung penyerangan terhadap orang yang dianggap menghina agamanya, dan 14% responden sangat setuju bahwa mereka memilih pertemanan yang identitasnya sama dengan mereka.

Meskipun nilainya tidak dominan, tetapi hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa responden memiliki sikap menolak keberagaman, penggunaan kekerasan dalam menghadapi masalah, dan menyikapi pluralitas dengan membedakan kehidupan bermasyarakat berdasarkan identitas yang ada. Hal ini tidak menutup kemungkinan membawa ancaman bagi persatuan dan kerawanan sosial, sehingga perlu diantisipasi melalui pengembangan sikap-sikap inklusif yang mengedepankan persatuan, menghormati perbedaan, toleransi dan kebersamaan dalam pembangunan masyarakat.

Gambar 5 menunjukkan tindakan responden terhadap isu radikalisasi yang dapat diidentifikasi melalui aksi atau kegiatan responden dalam lingkungannya berada yang menuntutnya untuk berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya yang beragam identitas. Berdasarkan tabel 3 mengenai tindakan responden terkait isu radikalisasi dan budaya inklusif, 71% responden tidak setuju dan 14% sangat tidak setuju untuk mengutamakan memberikan bantuan terhadap teman yang seagama terlebih dahulu, dan 14% responden setuju mengutamakan pemberian bantuan terhadap teman yang seagama terlebih dahulu. Kemudian, 86% responden setuju untuk mendatangi undangan syukuran penganut agama yang berbeda dengan mereka, dan 14% tidak setuju untuk mendatangi undangan syukuran penganut agama yang berbeda dengan mereka. Berikutnya, 57% responden setuju dan 29% sangat setuju terhadap kesediaannya memberikan sumbangan sosial kepada pemeluk agama lain yang memerlukan, dan 14% responden sangat tidak setuju memberikan sumbangan sosial kepada pemeluk agama lain yang memerlukan. Selanjutnya, 57% responden setuju dan 29% sangat setuju bahwa mereka termotivasi ikut aksi penolakan terhadap praktek kemaksiatan yang ada di masyarakat, dan 14% responden sangat tidak setuju bahwa mereka termotivasi ikut aksi penolakan. Terakhir, tabel tersebut menunjukkan 86% responden tidak setuju dan

14% sangat tidak setuju bahwa sebagai ketua kelompok, mereka akan memilih tim yang seagama dengan mereka.

Tindakan Responden



Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Gambar 5. Tindakan Responden terhadap Isu Radikalisasi dan Budaya Inklusif

Berdasarkan Gambar 5, memperlihatkan bahwa responden memiliki tindakan dalam membangun budaya inklusif di lingkungan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari 71% responden tidak setuju dan 14% sangat tidak setuju untuk mengutamakan memberikan bantuan terhadap teman yang seagama terlebih dahulu. Kemudian, 86% responden setuju untuk mendatangi undangan syukuran penganut agama yang berbeda dengan mereka. Berikutnya, 57% responden setuju dan 29% sangat setuju terhadap kesediaannya memberikan sumbangan sosial kepada pemeluk agama lain yang memerlukan. Selanjutnya, 14% responden sangat tidak setuju bahwa mereka termotivasi ikut aksi penolakan terhadap praktek kemaksiatan yang ada di masyarakat. Terakhir, 86% responden tidak setuju dan 14% sangat tidak setuju bahwa sebagai ketua kelompok, mereka akan memilih tim yang seagama dengan mereka. Dengan demikian, budaya inklusif ditunjukkan oleh responden melalui pemberian bantuan terhadap teman tidak diutamakan berdasarkan pertimbangan agama, kesediaan responden untuk menghadiri undangan syukuran penganut agama yang berbeda dengan mereka, kesediaannya memberikan sumbangan sosial tanpa melihat agamanya, tidak termotivasi untuk mengikuti aksi penolakan terhadap praktek kemaksiatan di masyarakat, dan sebagai ketua kelompok tidak akan memilih tim yang seagama dengan mereka. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mampu mengembangkan sikap saling menolong tanpa melihat unsur identitas, hidup bermasyarakat tanpa membedakan agamanya, solidaritas atas dasar kemanusiaan tanpa melihat identitasnya, ikut serta menjaga ketertiban dan mengembalikan masalah ke pihak yang berwenang, dan mampu bekerja dalam tim yang beragam identitas.

Namun demikian, terdapat kecenderungan yang mengarah pada radikalisasi tindakan di masyarakat, hal ini terlihat dari 14% responden sangat setuju untuk mengutamakan memberikan bantuan kepada teman yang seagama terlebih dahulu, 14% responden sangat tidak setuju memberikan sumbangan sosial kepada pemeluk agama lain yang memerlukan, dan 29% responden sangat setuju bahwa mereka termotivasi ikut aksi penolakan praktek kemaksiatan yang ada di masyarakat. Meskipun nilainya tidak dominan, tetapi hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa responden memiliki tindakan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat atas dasar identitas, padahal masalah kemanusiaan tidak bisa didasarkan atas identitas, dan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah sosial tanpa menyerahkannya kepada aparat keamanan yang berwenang.

SIMPULAN

Terdapat beberapa tahapan radikalisasi yang meliputi pra-radikalisasi yaitu kondisi sebelum radikalisasi. Selanjutnya identifikasi diri yaitu saat individu mulai mengarah pada radikalisasi. Individu kemudian memfokuskan kepercayaannya yang disebut tahap indoktrinasi. Tahapan terakhir individu akan melakukan aksi ekstrim dan teror atau dikenal dengan tahapan jihadisasi. Salah satu upaya dalam menghadapi radikalisasi ini dapat dimulai dari pembentukan budaya inklusif di masyarakat. Pembentukan masyarakat yang inklusif dilakukan sebagai upaya memberdayakan dan mempromosikan nilai-nilai inklusivitas sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang, terlepas identitas yang melatarinya.

Terpetik temuan bahwa, ada komponen masyarakat di Jatinangor yang sudah merujuk pada persepsi, sikap dan tindakan kondusif bagi terbinanya budaya inklusif di lingkungan mereka. Masyarakat di Jatinangor mampu mengembangkan prinsip dan menyikapi pluralitas dengan menghormati perbedaan identitas yang ada, inklusivisme dalam bermasyarakat, solidaritas atas dasar kemanusiaan tanpa membedakan berdasarkan identitasnya, toleransi dan kerjasama dalam keberagaman pada aspek suku, agama dan ras di lingkungan mereka berada. Namun demikian, berdasarkan hasil olah data, masih terdapat kecenderungan yang mengarah pada radikalisasi meskipun nilainya kecil. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, baik pemegang kebijakan daerah (pemerintah daerah hingga rukun tetangga), tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan keagamaan, dan bahkan mendapat hirauan dari keluarga sebagai pranata sosial terkecil dalam masyarakat.

Upaya menghadapi radikalisasi tidak cukup dan terbatas pada negara dan bersifat insidental dan formal saja, tetapi juga perlu adanya kegiatan di level sosial berbentuk agenda kegiatan rutin, komprehensif dan partisipatif. Rutin bermakna terjadwal, komprehensif artinya menyangkut beragam aspek yang terkait seperti politik, sosial dan budaya, dan partisipatif berarti kegiatan untuk menghadapi radikalisasi perlu melibatkan berbagai kalangan yang tidak hanya negara sentris, tetapi juga pelibatan seluruh komponen masyarakat, dari masyarakat umum, organisasi kepemudaan, sosial dan keagamaan, beragam tokoh yang ada di masyarakat, hingga keluarga sebagai pranata sosial yang terkecil dalam masyarakat. Selain itu, perlu kegiatan yang inovatif dan kreatif yang melibatkan anak muda dan organisasi kepemudaan serta keagamaan. Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan di atas juga, dapat direkomendasikan perancangan

upaya menghadapi radikalisasi pada usia anak-anak hingga remaja melalui media cetak seperti buku anak atau komik. Bentuk upaya ini dapat juga disalurkan melalui media hiburan dengan mengembangkan lagu anak-anak yang bersyairkan perdamaian, anti kekerasan, pengembangan budaya toleransi dan penghargaan terhadap pluralitas yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

REFERENSI

- Angus, C. (2016). *Radicalisation and violent extremism: Causes and responses*. New South Wales: New South Wales Parliamentary Research Service.
- Azra, A. (2006). *Indonesian Islam, mainstream muslims and politics*. Taipei: Taiwanese and Indonesian Islamic Leaders Exchange Project, The Asia Foundation in Taiwan.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kecamatan Jatinangor dalam angka 2018*. Bandung: BPS Sumedang.
- Banks, S., & Manners, P. (2012). *Community-based participatory research: A guide to ethical principles and practice*. Durham, UK: Center for Social Justice and Community Action, Durham University.
- Christmann, K. (2012). *Preventing religious radicalisation and violent extremism: A systematic review of the research evidence*. Huddersfield: University of Huddersfield.
- Jones, S. (2018). Radicalisation in the Philippines: The Cotabato cell of the "East Asia Wilayah". *Terrorism and Political Violence*, 30(6), 933-943. <https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1481190>
- Kartini, D. (2017). Densus 88 tangkap terduga teroris di Jatinangor. Retrieved August 18, 2019, from <https://regional.kontan.co.id/news/densus-88-tangkap-terduga-teroris-di-jatinangor>
- Lanti, I. G., Ebih, A., & Dermawan, W. (2019). *Examining the growth of Islamic conservatism in Indonesia: the case of West Java*. Singapore: Nanyang Technological University
- McFarlane, B., Zammit, A., Squires, M., Phelan, A., Iqbal, M., Lentini, P., Howie, L., ... & Tahiri, H. (2015). *Preventing violent extremism and radicalisation in australia*. Australia: Commonwealth of Australia and Living Safe Together.
- Prabowo, K. W. (2019). *Teroris jamaah islamiyah sedang memperkuat jaringan*. Retrieved August 20, 2019, from <https://www.medcom.id/nasional/hukum/akWVVMb-teroris-jamaah-islamiyah-sedang-memperkuat-jaringan>
- Rabasa, A. M. (2003). Chapter 4: Muslim separatism in the Philippines and Thailand. *Adelphi Series*, 43(358), 47-57. <https://doi.org/10.1080/714027887>

Schmid, A. P. (2013). Radicalisation, de-radicalisation, counter-radicalisation: A conceptual discussion and literature review. *ICCT Research Paper*, 97(1), 1-91. <https://doi.org/10.19165/2013.1.02>

Van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117-154. <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>